

ASIMETRI INFORMASI DALAM PENGADAAN PANGAN MBG: TATA KELOLA BUMDES, SPPG, PEMASOK, DAN PRODUSEN LOKAL

¹Muhammad Fadil, ²Nanik Wahyuni

^{1,2}Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ¹200504220013@student.uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Asimetri Informasi, Pengadaan Pangan; Program Makan Bergizi Gratis.

Cara Sitasi:

Penulis, Muhammad Fadil. "Asimetri Informasi dalam Pengadaan Pangan MBG: Tata Kelola Bumdes, SPPG, Pemasok, dan Produsen Lokal." *Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah)* [Volume 05, Nomor 01](#) Oktober 2026

ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala luas yang memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga terhadap pembentukan jaringan ekonomi pangan di tingkat lokal. Pelaksanaan pengadaan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemasok, dan produsen lokal yang mempunyai kepentingan serta penguasaan informasi berbeda. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya asimetri informasi yang dapat memengaruhi koordinasi, biaya transaksi, dan kesempatan produsen lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk asimetri informasi dalam pengadaan pangan MBG dan merumuskan tata kelola hubungan antarpelaku yang dapat memperluas akses informasi. Penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menempatkan teori asimetri informasi sebagai perspektif utama serta teori keagenan, biaya transaksi, dan tata kelola kolaboratif sebagai kerangka pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dapat muncul pada informasi kebutuhan, standar mutu, harga, prosedur pengadaan, kapasitas produksi, dan peluang kemitraan. BUMDes memiliki potensi sebagai information broker yang mempertemukan informasi permintaan SPPG dengan kapasitas produksi lokal. Model tata kelola yang diusulkan menekankan transparansi, aksesibilitas, verifikasi, komunikasi dua arah, dan akuntabilitas.

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a large-scale public policy whose implications extend beyond nutritional provision to the development of local food-economy networks. Food procurement involves Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG), Village-Owned Enterprises (BUMDes), suppliers, and local producers that possess different interests and information. Such differences create opportunities for information asymmetry that may affect coordination, transaction costs, and local producers' access to the procurement chain. This article aims to examine information asymmetry in MBG food procurement and formulate

an inter-organizational governance model that can broaden access to relevant information. The study is designed as a qualitative case study using in-depth interviews, observation, and document analysis. Thematic analysis is conducted by positioning information asymmetry as the primary analytical lens, supported by agency theory, transaction cost economics, and collaborative governance. The analysis indicates that information gaps may concern procurement needs, quality standards, prices, procedures, production capacity, and partnership opportunities. BUMDes has the potential to operate as an information broker that connects SPPG demand with local production capacity. The proposed governance model emphasizes transparency, accessibility, verification, two-way communication, and accountability.

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan publik strategis yang pelaksanaannya memiliki dimensi sosial, gizi, kelembagaan, dan ekonomi sekaligus (Rahayu, 2025). Penyediaan makanan bergizi dalam skala besar menuntut adanya sistem pengadaan pangan yang mampu menjaga kontinuitas pasokan, mutu bahan, keamanan pangan, ketepatan waktu, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari terselurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan tata kelola pengadaan dalam menghubungkan kebutuhan SPPG dengan kapasitas produksi dan distribusi pangan di wilayah sekitarnya (Khatmawati, H., & Putri, 2026).

Skala penyelenggaraan MBG memperlihatkan bahwa sistem pengadaan telah melibatkan banyak pelaku ekonomi. Badan Gizi Nasional pada Januari 2026 melaporkan keterlibatan sekitar 61.857 pemasok dalam pelaksanaan program, yang terdiri atas koperasi, BUMDes, BUMDesma, UMKM, dan pemasok perseorangan. Di antara jumlah tersebut terdapat 806 BUMDes dan 82 BUMDesma yang tercatat sebagai pemasok. Besarnya jumlah pelaku tersebut menunjukkan bahwa pengadaan MBG telah berkembang menjadi jaringan ekonomi yang membutuhkan mekanisme koordinasi antarlembaga secara lebih terstruktur (Databoks., n.d.).

Keterlibatan BUMDes dan pelaku ekonomi lokal menjadi relevan karena kebijakan MBG juga membuka ruang bagi penyerapan produk dari wilayah setempat. Ketika kebutuhan pangan dalam jumlah besar dapat dipertemukan dengan kapasitas produksi masyarakat desa, program berpotensi menciptakan pasar yang lebih pasti, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan sirkulasi ekonomi lokal. (Puri, I. T., & Khoirunurrofik, 2021) menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Temuan tersebut memberi dasar bahwa BUMDes dapat ditempatkan sebagai salah satu kelembagaan lokal yang berpotensi memperkuat hubungan antara kebutuhan program pemerintah dan sumber daya ekonomi masyarakat.

Namun, banyaknya aktor tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. SPPG membutuhkan informasi mengenai ketersediaan, kualitas, harga, dan kapasitas pasokan. Pemasok membutuhkan informasi mengenai volume kebutuhan, spesifikasi bahan, standar mutu, jadwal pemenuhan, serta prosedur pengadaan. Di sisi lain, produsen lokal memerlukan informasi tentang komoditas yang dibutuhkan, persyaratan kualitas, peluang kemitraan, mekanisme transaksi, dan waktu pemenuhan. Ketika informasi tersebut tidak tersedia secara tepat, lengkap, dan dapat diakses secara proporsional, hubungan antarpelaku dapat menghadapi ketidakpastian dan masalah koordinasi.

Informasi dalam proses pengadaan bukan sekadar alat komunikasi. Informasi juga merupakan sumber daya ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas keputusan, posisi tawar, dan kemampuan aktor dalam merespons perubahan kebutuhan. Aktor yang memiliki informasi lebih lengkap atau lebih cepat dapat memperoleh keunggulan dibandingkan pihak yang hanya menerima informasi secara terbatas. Situasi demikian merupakan inti dari konsep asimetri informasi. Perbedaan informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi dapat menimbulkan persoalan pasar ketika kualitas atau kondisi transaksi tidak dapat diamati secara setara (Akerlof, 1970). (Spence, 1973) dan (Stiglitz, 2000) kemudian memperluas kajian ekonomi informasi dengan menunjukkan pentingnya sinyal, seleksi, dan biaya memperoleh informasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengadaan pangan MBG, asimetri informasi dapat muncul dalam beberapa bentuk. SPPG mungkin mempunyai informasi lebih rinci mengenai kebutuhan dan standar bahan pangan, sedangkan pemasok mempunyai pengetahuan yang lebih dekat dengan kondisi harga, jaringan pasokan, dan ketersediaan komoditas (Setiawan, 2026). Produsen lokal mengetahui kapasitas produksi, kualitas hasil, dan kendala produksinya, tetapi belum tentu mempunyai akses yang sama terhadap informasi kebutuhan SPPG atau prosedur untuk masuk ke jaringan pengadaan. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan adverse selection ketika pihak pengadaan kesulitan menilai kualitas atau kapasitas penyedia sebelum transaksi, serta moral hazard ketika tindakan salah satu pihak tidak dapat diamati secara memadai setelah hubungan terbentuk.

Asimetri informasi juga memiliki konsekuensi terhadap biaya transaksi. Ketika informasi mengenai pemasok, kualitas, harga, kapasitas, dan kebutuhan tidak tersedia dengan baik, aktor harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mencari, memeriksa, mengonfirmasi, bernegosiasi, dan memantau (Nasirin, M. K., Santoso, M. S. I. B., Umam, S., & Al-Azhar, 2026). Transaksi selalu memerlukan biaya, terutama ketika terdapat ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Dalam konteks pengadaan pangan yang berlangsung berulang dan melibatkan banyak aktor, biaya pencarian serta koordinasi informasi dapat menjadi bagian penting dari efektivitas tata Kelola (Williamson, 1985).

Persoalan tersebut membuat posisi BUMDes menjadi menarik untuk dikaji. BUMDes berada dekat dengan masyarakat desa dan sumber daya produksi lokal. Secara kelembagaan, posisi ini membuka peluang bagi BUMDes untuk tidak hanya berperan sebagai pemasok, tetapi juga sebagai penghubung informasi antara kebutuhan SPPG dan kemampuan produsen. BUMDes dapat menghimpun informasi mengenai komoditas dan kapasitas produksi, menerima informasi mengenai kebutuhan, menerjemahkan persyaratan pengadaan, serta membantu mempertemukan kedua sisi tersebut. Dalam kerangka ini, BUMDes dapat dipahami sebagai calon *information broker* (Sopannah, A., Kurniawati, R., & Anggarani, 2023).

Meski demikian, fungsi tersebut tidak boleh diasumsikan sebagai fakta sebelum diuji melalui data lapangan. BUMDes dapat mengurangi kesenjangan informasi apabila mampu mendistribusikan informasi secara transparan, tepat waktu, dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, apabila informasi yang dikuasai hanya diteruskan kepada kelompok tertentu, BUMDes justru dapat menjadi *information gatekeeper*. Karena itu, persoalan yang lebih penting bukan sekadar apakah BUMDes terlibat dalam pengadaan, melainkan bagaimana BUMDes mengelola dan mendistribusikan informasi kepada aktor-aktor dalam rantai pasok.

Sejumlah kajian mengenai BUMDes menempatkan lembaga tersebut sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, sedangkan kajian mengenai pengadaan publik banyak membahas hubungan keagenan, biaya transaksi, dan ketidakpastian informasi. Penelitian (Wooten, J. O., Donohue, J. M., Fry, T. D., & Whitcomb, 2020) menunjukkan bahwa perbedaan informasi

dalam mekanisme pengadaan dapat memengaruhi perilaku peserta. (Bodendorf, F., Hollweck, B., & Franke, 2022) juga memperlihatkan bahwa asimetri informasi antara pembeli dan pemasok menjadi persoalan penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Pengadaan publik sebagai hubungan yang rentan terhadap asimetri informasi dan persoalan keagenan (Chrisidu-Budnik, 2020). Namun, masih terdapat ruang untuk menghubungkan kajian tersebut dengan konteks rantai pasok pangan MBG dan peran kelembagaan desa sebagai perantara informasi.

Sejumlah kajian mengenai pengadaan pangan dan rantai pasok selama ini lebih banyak menempatkan ketersediaan bahan, efisiensi distribusi, serta hubungan antara pembeli dan pemasok sebagai perhatian utama (Pramudya, F. N., Barus, R. A. K., & Musdalifah, 2026). Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perspektif tersebut menjadi semakin kompleks karena proses pengadaan melibatkan berbagai aktor dengan karakteristik, kepentingan, dan penguasaan informasi yang berbeda. SPPG memiliki informasi mengenai kebutuhan program dan persyaratan bahan pangan, sementara pemasok dan produsen lokal memiliki pengetahuan yang lebih dekat dengan kondisi pasokan, kapasitas produksi, serta ketersediaan komoditas. BUMDes berada pada posisi yang berpotensi mempertemukan kedua sisi tersebut. Perbedaan penguasaan informasi ini menunjukkan bahwa kelancaran rantai pasok tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memindahkan bahan pangan dari produsen menuju SPPG, tetapi juga oleh bagaimana informasi mengenai kebutuhan, kualitas, harga, kapasitas, dan peluang kemitraan dapat dipertukarkan antarpelaku. Produsen yang memiliki kapasitas produksi belum tentu dapat berpartisipasi dalam rantai pasok apabila tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan mekanisme pengadaan.

Kondisi tersebut menjadikan hubungan informasi antarpelaku sebagai aspek yang penting untuk diperhatikan dalam tata kelola pengadaan pangan MBG. Dalam hubungan tersebut, BUMDes memiliki posisi yang menarik karena kedekatannya dengan sumber daya ekonomi dan produsen lokal memungkinkan lembaga ini berperan dalam mempertemukan kebutuhan SPPG dengan kapasitas produksi masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk dan sumber ketimpangan informasi dalam pengadaan pangan MBG serta memahami bagaimana kondisi tersebut memengaruhi hubungan antara SPPG, BUMDes, pemasok, dan produsen lokal. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merumuskan pola tata kelola informasi yang dapat memperkuat koordinasi, memperluas akses informasi, dan mendukung keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok pangan MBG. Dalam kerangka tersebut, BUMDes dipandang tidak semata-mata sebagai pelaku ekonomi atau pemasok, tetapi juga sebagai institusi lokal yang memiliki potensi menjalankan fungsi mediasi informasi dalam hubungan antarpelaku rantai pasok.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Asimetri Informasi dalam Pengadaan

Asimetri informasi merujuk pada keadaan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mempunyai informasi yang setara mengenai objek, kondisi, kualitas, atau konsekuensi transaksi. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi keputusan karena aktor yang mempunyai informasi lebih lengkap berada pada posisi yang berbeda dengan aktor yang memiliki keterbatasan informasi (Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, L., Alfitri, S., & Febriyanti, 2025). Dalam model Akerlof (1970), ketidakpastian mengenai kualitas dapat menyebabkan pembeli mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi informasi menunjukkan bahwa pencarian dan pengungkapan informasi merupakan bagian penting dari proses ekonomi.

Dalam pengadaan, informasi yang relevan tidak hanya menyangkut harga. Informasi mengenai kualitas, kapasitas pemasok, kemampuan memenuhi spesifikasi, ketepatan waktu, kontinuitas pasokan, dan risiko transaksi juga menentukan kualitas keputusan. (Wooten, J. O., Donohue, J. M., Fry, T. D., & Whitcomb, 2020) memperlihatkan bahwa perbedaan informasi dalam lelang pengadaan dapat memengaruhi perilaku peserta. (Bodendorf, F., Hollweck, B., & Franke, 2022) menunjukkan bahwa informasi mengenai kondisi pemasok yang tidak sepenuhnya tersedia bagi pembeli dapat memengaruhi proses negosiasi dan keputusan pembelian.

Dalam penelitian ini, teori asimetri informasi digunakan sebagai teori utama untuk mengidentifikasi siapa yang menguasai informasi tertentu, siapa yang memiliki keterbatasan akses, bagaimana informasi tersebut mengalir, serta apa konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut. Informasi yang diamati mencakup kebutuhan pangan, spesifikasi, kualitas, harga, volume, jadwal, prosedur, kapasitas produksi, dan peluang kemitraan.

2. Principal-Agent Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan ketika satu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, sementara kedua pihak tidak selalu memiliki kepentingan dan informasi yang sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan pengawasan karena principal tidak selalu mampu mengamati seluruh tindakan agent (Chenkiani, P., & Prasetyo, 2023). Dalam pengadaan publik, hubungan keagenan dapat muncul pada beberapa tingkat, termasuk antara pihak penyelenggara program, pelaksana operasional, pemasok, dan pihak penyedia (Tonny, F., Suhartono, R. M., & Nurcahyo, 2025).

Dalam konteks MBG, teori ini membantu menjelaskan mengapa verifikasi, monitoring, seleksi, dan mekanisme pengungkapan informasi diperlukan. SPPG perlu memastikan bahwa pemasok mampu memenuhi standar dan kebutuhan, sementara pemasok membutuhkan kejelasan mengenai permintaan dan prosedur (Dirmansyah, A., Yanto, A. T., Permana, M. F. A., Madaningrum, R. F., & Utomo, 2026). Produsen lokal juga membutuhkan informasi agar dapat menyesuaikan produksi. Karena itu, mekanisme pengawasan dan komunikasi menjadi bagian dari tata kelola untuk mengurangi risiko akibat informasi yang tidak seimbang. Pengadaan publik memiliki karakteristik hubungan keagenan yang kuat karena otoritas pengadaan dan kontraktor dapat mempunyai pengetahuan serta kepentingan yang tidak sepenuhnya sama (Chrisidu-Budnik, 2020).

3. Transaction Cost Economics

Transaction Cost Economics memandang bahwa pertukaran ekonomi memerlukan biaya di luar harga barang itu sendiri. Biaya tersebut dapat berupa pencarian mitra, pencarian informasi, negosiasi, penyusunan kesepakatan, verifikasi, monitoring, dan penanganan ketidakpastian (Williamson, 1985). Dalam pengadaan pangan, biaya transaksi dapat meningkat ketika pihak pengadaan harus berulang kali mencari pemasok, memeriksa kualitas, memvalidasi harga, memastikan kapasitas, dan melakukan koordinasi jadwal (Suryani, B., Mazwan, M., Novrian, R. I., Melani, M., Masruroh, S., Ramadani, I., ... & Al Arkaan, 2026).

Hubungan antara asimetri informasi dan biaya transaksi dapat dirumuskan secara konseptual sebagai berikut: asimetri informasi meningkatkan ketidakpastian; ketidakpastian meningkatkan kebutuhan pencarian, verifikasi, dan koordinasi; kebutuhan tersebut menambah biaya transaksi; dan peningkatan biaya transaksi dapat memengaruhi

efektivitas pengadaan(Fitri, 2022). Dengan demikian, lembaga yang mampu memperbaiki kualitas informasi berpotensi mengurangi sebagian biaya koordinasi dan pencarian.

4. BUMDes sebagai Institusi Ekonomi Lokal

BUMDes merupakan kelembagaan ekonomi desa yang diarahkan untuk mengelola potensi lokal dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat(Dharma, I. P. S. G., Suryawan, I. G. B., & Putra, 2023). (Puri, I. T., & Khoirunurrofik, 2021) menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks MBG, fungsi BUMDes dapat dikembangkan lebih jauh dengan menghubungkan kapasitas produksi lokal dengan kebutuhan institusional SPPG.

Dalam penelitian ini, BUMDes tidak ditempatkan hanya sebagai penjual atau pemasok. BUMDes diposisikan sebagai institusi yang berpotensi menjalankan fungsi *information broker*. Fungsi tersebut dapat mencakup pemetaan produsen, penghimpunan informasi kapasitas, penerimaan informasi kebutuhan SPPG, penyampaian persyaratan pengadaan, fasilitasi komunikasi, dan pengurangan biaya pencarian informasi(Hadi, S., Soetrisno, S., Subekti, S. S. S., & Aji, 2025).

Namun, fungsi *information broker* merupakan proposisi analitis yang harus diuji. BUMDes baru dapat disebut efektif sebagai perantara informasi apabila informasi yang dikuasai benar-benar mampu mempertemukan sisi permintaan dan produksi, bukan sekadar menambah satu lapisan perantara dalam rantai pasok(Wuryan Andayani, S. E., Adib, N., Arif, M. E., Murdianingrum, S. L., Sri Wahyuni, S. E., Indrayani, 2025).

5. Collaborative Governance

Hubungan antara SPPG, BUMDes, pemasok, dan produsen lokal memiliki karakter lintas organisasi sehingga tidak cukup dijelaskan hanya melalui mekanisme transaksi. Collaborative governance menyediakan perspektif untuk memahami bagaimana aktor publik dan nonpublik dapat membangun koordinasi melalui dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan desain kelembagaan (Ansell, C., & Gash, 2008).

Dalam penelitian ini, collaborative governance berfungsi sebagai teori pendukung untuk menjelaskan mekanisme kelembagaan yang dapat mengurangi kesenjangan informasi. Transparansi, komunikasi dua arah, forum koordinasi, verifikasi, dan akuntabilitas merupakan unsur yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antarpelaku.

Perspektif

Fungsi Analitis

<i>Asimetri Informasi</i>	Mengidentifikasi ketimpangan penguasaan dan akses informasi.
<i>Principal-Agent</i>	Menjelaskan persoalan pengawasan, seleksi, dan perilaku dalam hubungan transaksi.
<i>Transaction Cost Economics</i>	Menjelaskan konsekuensi ketidakpastian informasi terhadap biaya pencarian, verifikasi, dan koordinasi.
<i>Collaborative Governance</i>	Menjelaskan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan lintas aktor.
<i>BUMDes sebagai Institusi Lokal</i>	Menganalisis potensi BUMDes sebagai perantara informasi antara kebutuhan SPPG dan kapasitas produsen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, pengalaman, relasi, dan mekanisme pertukaran informasi yang terjadi di antara para aktor pengadaan pangan MBG. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menjelaskan bagaimana informasi diperoleh, dipertukarkan, digunakan, dan dinegosiasikan dalam konteks kelembagaan yang nyata.

Unit analisis penelitian adalah hubungan informasi dalam pengadaan pangan yang melibatkan empat kelompok aktor, yaitu SPPG, BUMDes, pemasok, dan produsen lokal. SPPG ditempatkan pada sisi kebutuhan dan pelaksanaan program, pemasok pada sisi penyediaan, produsen lokal pada sisi produksi, sedangkan BUMDes pada posisi potensial sebagai penghubung antara kebutuhan program dan sumber daya ekonomi desa.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pengadaan pangan. Informan dapat mencakup pengelola SPPG, pengurus BUMDes, pemasok bahan pangan, petani atau produsen lokal, serta pihak pemerintah desa yang memahami hubungan kelembagaan dan kegiatan ekonomi setempat. Untuk menjaga kedalaman data, wawancara diarahkan pada aktor yang terlibat langsung atau mempunyai pengetahuan memadai mengenai aliran informasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk menggali sumber informasi, cara penyampaian kebutuhan, akses terhadap informasi harga dan kualitas, mekanisme pemilihan pemasok, pengalaman produsen dalam memperoleh peluang kemitraan, hambatan komunikasi, serta peran BUMDes dalam mempertemukan informasi. Observasi digunakan untuk melihat pola interaksi dan koordinasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa dan melengkapi informasi hasil wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data kemudian dikoding dan dikelompokkan ke dalam tema sumber informasi, distribusi informasi, kesenjangan informasi, konsekuensi asimetri, mekanisme koordinasi, dan fungsi BUMDes sebagai perantara.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Keterangan dari SPPG dibandingkan dengan informasi dari BUMDes, pemasok, dan produsen lokal. Hasil wawancara juga dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia. Prosedur tersebut digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu perspektif dan meningkatkan kredibilitas interpretasi.

Hasil Penelitian

1. Asimetri Informasi dalam Pengadaan Pangan MBG

Analisis penelitian memperlihatkan bahwa pengadaan pangan MBG melibatkan pembagian informasi yang tidak sepenuhnya sama di antara aktor. SPPG mempunyai informasi yang relatif lebih dekat dengan kebutuhan program, seperti jenis bahan, jumlah, standar kualitas, dan waktu pemenuhan. Produsen lokal, sebaliknya, lebih memahami kapasitas produksi, ketersediaan komoditas, serta kendala produksi. Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi masalah apabila terdapat mekanisme yang mampu mempertemukan kedua jenis informasi.

Persoalan muncul ketika informasi kebutuhan SPPG tidak tersampaikan secara memadai kepada produsen. Produsen dapat mengetahui bahwa MBG mempunyai kebutuhan pangan yang besar, tetapi belum tentu mengetahui komoditas yang sedang

dibutuhkan, volume, jadwal, standar, atau prosedur untuk menjadi bagian dari jaringan pengadaan. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pengetahuan mengenai keberadaan pasar dan pengetahuan mengenai cara mengakses pasar.

Dari perspektif asimetri informasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses informasi merupakan bagian dari sumber daya ekonomi. Aktor yang memperoleh informasi lebih cepat dan lebih lengkap mempunyai kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan keputusan. Karena itu, keterbatasan partisipasi produsen lokal tidak selalu dapat dijelaskan oleh keterbatasan produksi atau modal, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap informasi permintaan.

2. Kesenjangan Informasi antara SPPG dan Produsen Lokal

SPPG dan produsen lokal sebenarnya mempunyai informasi yang saling melengkapi. SPPG mengetahui apa yang harus tersedia, sedangkan produsen mengetahui apa yang mampu diproduksi. Jika kedua informasi tersebut bertemu secara tepat, maka proses pengadaan dapat menjadi lebih responsif. Sebaliknya, apabila informasi berjalan melalui saluran yang terbatas, maka potensi produksi lokal tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi pasokan bagi MBG.

Kesenjangan informasi tersebut juga berpengaruh terhadap inklusivitas. Produsen yang telah terhubung dengan pemasok atau mempunyai jaringan komunikasi dengan SPPG memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui kebutuhan dan menyiapkan pasokan. Produsen di luar jaringan dapat tertinggal meskipun memiliki komoditas yang sebenarnya sesuai.

Temuan ini memperlihatkan bahwa inklusivitas rantai pasok tidak cukup diukur dari jumlah produsen lokal yang pernah melakukan transaksi. Aspek yang lebih mendasar adalah apakah produsen mempunyai kesempatan yang memadai untuk memperoleh informasi yang memungkinkan mereka memenuhi persyaratan dan merespons permintaan.

3. Konsentrasi Informasi pada Jaringan Pemasok

Pemasok mempunyai posisi strategis karena menerima informasi kebutuhan dan kemudian menerjemahkannya menjadi aktivitas pencarian bahan. Pada tahap ini, informasi mengenai permintaan dapat terkonsentrasi pada jaringan pemasok. Produsen yang sudah berada dalam jaringan tersebut lebih mudah memperoleh informasi mengenai kebutuhan, sedangkan produsen yang belum mempunyai hubungan cenderung menunggu pesanan.

Konsentrasi informasi tidak selalu berarti terjadi penyalahgunaan. Namun, dari sudut pandang tata kelola, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat menciptakan perbedaan peluang akses. Informasi yang hanya beredar di jaringan tertentu dapat membatasi kemampuan produsen lain untuk mengetahui dan merespons peluang pengadaan.

Karena itu, analisis rantai pasok MBG perlu melihat dua arus sekaligus, yaitu arus barang dan arus informasi. Arus barang menggambarkan perpindahan komoditas, sedangkan arus informasi menentukan siapa yang mengetahui kebutuhan, siapa yang mampu merespons, dan siapa yang memperoleh kesempatan bertransaksi.

4. BUMDes sebagai *Information Broker*

BUMDes mempunyai posisi yang berpotensi strategis karena berhubungan dengan masyarakat dan sumber daya produksi desa. Jika BUMDes mempunyai akses terhadap

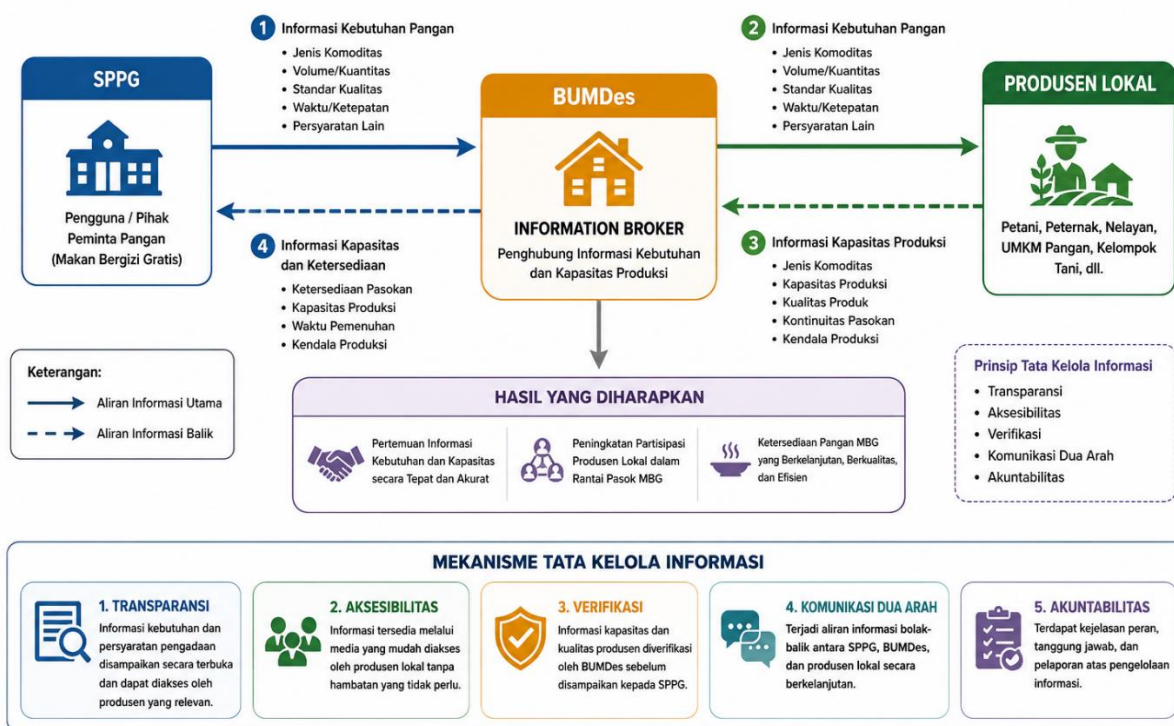
informasi kebutuhan SPPG sekaligus memahami kapasitas produsen lokal, BUMDes dapat menjadi titik temu antara kedua informasi tersebut.

Aliran informasi dapat berlangsung dari SPPG menuju BUMDes dan kemudian kepada produsen. Informasi yang diteruskan dapat mencakup jenis komoditas, kuantitas, kualitas, jadwal, serta persyaratan lain. Sebaliknya, produsen dapat menyampaikan informasi mengenai ketersediaan komoditas, kapasitas, kontinuitas, dan kendala produksi kepada BUMDes untuk diteruskan kepada SPPG.

Dengan demikian, BUMDes dapat menjalankan fungsi information broker, yaitu menghubungkan pihak yang mempunyai informasi mengenai permintaan dengan pihak yang mempunyai informasi mengenai kapasitas produksi. Fungsi ini berpotensi mengurangi biaya pencarian informasi dan memperbaiki koordinasi.

Namun, fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan. BUMDes harus mampu memperoleh informasi yang valid, menyampaikannya secara tepat waktu, menjaga transparansi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi produsen. Tanpa mekanisme tersebut, BUMDes hanya menjadi lapisan perantara tambahan tanpa benar-benar mengurangi ketidakpastian.

MODEL TATA KELOLA INFORMASI DALAM PENGADAAN PANGAN MBG



Gambar 1. Model Tata Kelola Informasi dalam Pengadaan Pangan MBG

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

5. BUMDes sebagai *Information Bridge* atau *Information Gatekeeper*

Peran BUMDes perlu dianalisis secara kritis karena posisi sebagai intermediary dapat menghasilkan dua kemungkinan. Pada kondisi pertama, BUMDes menjadi information bridge ketika informasi kebutuhan SPPG dibuka kepada produsen yang relevan dan informasi kapasitas produsen diteruskan kembali kepada SPPG. Mekanisme tersebut memperluas akses dan dapat meningkatkan peluang keterlibatan pelaku lokal.

Pada kondisi kedua, BUMDes dapat berubah menjadi information gatekeeper apabila informasi mengenai kebutuhan hanya dikuasai atau disampaikan kepada kelompok produsen tertentu. Dalam keadaan demikian, perantara tidak menghilangkan asimetri, melainkan memindahkan titik konsentrasi informasi ke aktor intermediary.

Implikasinya adalah kinerja BUMDes tidak cukup dinilai dari kemampuan menyediakan bahan pangan. Indikator yang lebih relevan adalah apakah BUMDes mampu memperluas akses informasi, menjaga keterbukaan, melakukan verifikasi, dan menciptakan komunikasi dua arah. Dengan perspektif tersebut, fungsi ekonomi BUMDes menjadi sekaligus fungsi tata kelola informasi.

6. Asimetri Informasi dan Inklusivitas Rantai Pasok

Asimetri informasi mempunyai implikasi langsung terhadap inklusivitas rantai pasok. Produsen lokal yang tidak mengetahui kebutuhan atau persyaratan pengadaan akan mengalami hambatan meskipun mempunyai kapasitas produksi. Sebaliknya, produsen yang mempunyai akses informasi lebih baik dapat merencanakan produksi dan membangun hubungan dengan pemasok atau SPPG.

Temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa rantai pasok yang inklusif membutuhkan lebih dari sekadar keterlibatan produsen lokal dalam transaksi. Inklusivitas juga memerlukan kesempatan yang relatif setara untuk mengetahui informasi pasar. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi bagian dari infrastruktur kelembagaan yang mendukung partisipasi ekonomi.

Secara konseptual, proposisi penelitian dapat dirumuskan bahwa semakin baik akses terhadap informasi kebutuhan dan persyaratan pengadaan, semakin besar kemampuan produsen lokal untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan program. Hubungan tersebut tidak berarti bahwa akses informasi otomatis menghasilkan transaksi, tetapi informasi menjadi prasyarat penting bagi produsen untuk mengambil keputusan.

7. Model Tata Kelola Informasi dalam Pengadaan Pangan MBG

Model tata kelola yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan pengelolaan informasi sebagai bagian dari mekanisme pengadaan, bukan sebagai aktivitas tambahan. Model tersebut menghubungkan SPPG, BUMDes, pemasok, dan produsen lokal melalui aliran informasi dua arah. SPPG menyampaikan kebutuhan, sedangkan produsen menyampaikan kapasitas. BUMDes dapat menjalankan fungsi mediasi dan konsolidasi informasi, sementara pemasok tetap berperan sebagai penyedia yang memenuhi kebutuhan sesuai standar.

Model tersebut bertumpu pada lima prinsip. Pertama, transparansi, yaitu ketersediaan informasi kebutuhan dan persyaratan secara jelas. Kedua, aksesibilitas, yaitu informasi dapat dijangkau oleh produsen yang relevan tanpa hambatan yang tidak perlu. Ketiga, verifikasi, yaitu informasi mengenai kualitas dan kapasitas diperiksa sebelum menjadi dasar keputusan. Keempat, komunikasi dua arah, yaitu informasi tidak hanya bergerak dari SPPG kepada penyedia, tetapi juga dari produsen kepada pihak pengadaan. Kelima, akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penyampaian, pembaruan, dan penggunaan informasi.

Model tersebut sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menekankan pentingnya interaksi, kepercayaan, dan pemahaman bersama dalam hubungan lintas aktor (Ansell & Gash, 2008). Dalam perspektif biaya transaksi, mekanisme informasi yang lebih baik juga berpotensi mengurangi kebutuhan pencarian dan verifikasi yang berulang. Dengan demikian, tata kelola informasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga dapat mendukung efisiensi koordinasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menempatkan asimetri informasi sebagai persoalan penting dalam tata kelola pengadaan pangan MBG. SPPG, BUMDes, pemasok, dan produsen lokal mempunyai posisi serta penguasaan informasi yang berbeda. SPPG cenderung lebih mengetahui kebutuhan program, sedangkan produsen mengetahui kapasitas produksi. Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber ketidakpastian apabila tidak tersedia mekanisme yang mempertemukan informasi permintaan dan informasi produksi.

Asimetri informasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas atau harga, tetapi juga dengan kebutuhan, volume, standar, waktu pemenuhan, prosedur pengadaan, kapasitas produksi, dan peluang kemitraan. Ketika informasi tersebut hanya beredar pada jaringan tertentu, produsen lokal yang berada di luar jaringan dapat mengalami keterbatasan akses terhadap peluang pasar. Karena itu, inklusivitas rantai pasok perlu dipahami sekaligus sebagai persoalan inklusivitas informasi.

BUMDes memiliki potensi untuk menjalankan fungsi information broker dengan menghubungkan kebutuhan SPPG dan kapasitas produsen lokal. Fungsi tersebut dapat membantu mengurangi biaya pencarian informasi dan memperbaiki koordinasi. Akan tetapi, BUMDes juga perlu dikelola agar tidak berubah menjadi information gatekeeper. Keterbukaan, verifikasi, komunikasi dua arah, dan akuntabilitas menjadi syarat penting agar fungsi perantara benar-benar mengurangi ketimpangan informasi.

Implikasi penelitian adalah perlunya penguatan tata kelola informasi sebagai bagian dari pengadaan pangan MBG. Sistem informasi sederhana mengenai kebutuhan, kapasitas produsen, kualitas, dan jadwal dapat menjadi instrumen awal. BUMDes dapat diarahkan menjadi simpul informasi ekonomi desa yang mempertemukan permintaan institusional dengan sumber daya lokal. Untuk penelitian lanjutan, model ini perlu diuji melalui data lapangan yang lebih luas dan dibandingkan antarwilayah agar dapat diketahui kondisi kelembagaan yang paling efektif dalam mengurangi asimetri informasi.

Daftar Pustaka

- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, L., Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 01–07.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bodendorf, F., Hollweck, B., & Franke, J. (2022). Information asymmetry in business-to-business negotiations: A game theoretical approach to support purchasing decisions with suppliers. *Group Decision and Negotiation*, 31, 723–745. <https://doi.org/10.1007/s10726-022-09780-3>
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud dan monitoring dalam perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180.
- Chrisidu-Budnik, A. (2020). Public purchasing and agency theory. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_1581-1
- Databoks. (n.d.). *UMKM jadi pemasok utama dapur MBG awal 2026*. Katadata Insight Center. Retrieved <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen->

- kesehatan/statistik/697027300c9d3/umkm-jadi-pemasok-utama-dapur-mbg-awal-2026
- Dharma, I. P. S. G., Suryawan, I. G. B., & Putra, I. M. A. M. (2023). Peranan BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 51–54.
- Dirmansyah, A., Yanto, A. T., Permana, M. F. A., Madaningrum, R. F., & Utomo, B. P. C. (2026). Strategi Manajemen Rantai Pasok Pangan Lokal Untuk Mendukung Keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 4(1), 1835–184.
- Fitri, R. M. (2022). *BIAYA MODAL EKUITAS MELALUI ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: MANAJEMEN LABA DAN PENGUNGKAPAN SUKARELA*. Universitas Putra Indonesia YPTK.
- Hadi, S., Soetriono, S., Subekti, S. S. S., & Aji, J. M. M. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. PT. Star Digital Publishing.
- Khatmawati, H., & Putri, Y. E. (2026). Model rantai pasok berkelanjutan pada program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal di Kabupaten Sumbawa. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3, 418–437.
- Nasirin, M. K., Santoso, M. S. I. B., Umam, S., & Al-Azhar, M. F. (2026). Peran Informasi Harga Dalam Mempengaruhi Keputusan Konsumen Di Pasar Mikro. *Islamic Banking and Finance*, 6(1), 70–86.
- Pramudya, F. N., Barus, R. A. K., & Musdalifah, N. (2026). Model Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Lokal Berbasis Kemitraan untuk Mendukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *Jejak Ilmiah : Jurnal Riset Dan Pengembangan*, 1(1), 57–78.
- Puri, I. T., & Khoirunurrofik, K. (2021). The role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for the village community economy. *Economics Development Analysis Journal*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.15294/edaj.v10i1.40823>
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika dukungan politik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia. , 8(2), 815–831. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 2(8), 815–831.
- Setiawan, A. (2026). Penerapan Asas Kecermatan dalam Pengadaan Pangan Program Makan Bergizi Gratis: Studi Terhadap Standar Due Diligence Pejabat Administrasi Negara. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 408–414.
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam rangka optimalisasi pendapatan asli desa (PAD) berbasis kearifan lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Stiglitz, J. E. (2000). The contributions of the economics of information to twentieth century economics. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1441–1478. <https://doi.org/10.1162/003355300555015>
- Suryani, B., Mazwan, M., Novrian, R. I., Melani, M., Masruroh, S., Ramadani, I., ... & Al Arkaan, M. A. Q. (2026). *Manajemen Pengadaan*. Serasi Media Teknologi.
- Tonny, F., Suhartono, R. M., & Nurcahyo, E. (2025). TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INSTANSI PEMERINTAH. *Kamiya Jaya Aquatic*.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.

- Wooten, J. O., Donohue, J. M., Fry, T. D., & Whitcomb, K. M. (2020). To thine own self be true: Asymmetric information in procurement auctions. *Production and Operations Management*, 29(7). <https://doi.org/10.1111/poms.13174>
- Wuryan Andayani, S. E., Adib, N., Arif, M. E., Murdianingrum, S. L., Sri Wahyuni, S. E., Indrayani, S. E. (2025). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI PILAR KEBERHASILAN BUMDES*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.